

PENGARUH BELANJA DAERAH, PAD DAN IPM TERHADAP KEMISKINAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 – 2024

Mutiara Raya Rabani¹; Ruth Eviana Hutabarat²

Universitas Negeri Surabaya^{1,2}

Email : mutiara.22176@mhs.unesa.ac.id¹; ruthhutabarat@unesa.ac.id²

ABSTRAK

Studi ini menganalisis dampak belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode 2020–2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel di 11 kabupaten/kota, dengan sumber data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan. Temuan menunjukkan bahwa belanja daerah dan IPM berkorelasi signifikan negatif terhadap kemiskinan, PAD memiliki dampak positif yang signifikan. Ketiga variabel ini secara simultan telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dengan koefisien determinasi yang tinggi. Hasil ini menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal yang efisien dan pembangunan manusia yang inklusif sebagai strategi kunci dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Maluku.

Kata kunci : *Belanja Daerah; PAD; IPM; Kemiskinan*

ABSTRACT

This study analyzes the impact of regional expenditure, Locally-Owned Revenue (PAD), and the Human Development Index (HDI) on poverty levels in Maluku Province during the 2020–2024 period. The analysis was conducted using a panel data regression method in 11 districts/cities, with data sources taken from the Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Finance's Regional Development Planning System (SIKD). The findings indicate that regional expenditure and HDI have a negative and significant impact on poverty, while PAD has a significant positive impact. These three variables simultaneously have been shown to have a significant influence with a high coefficient of determination. These results highlight the importance of efficient fiscal management and inclusive human development as key strategies in reducing poverty levels in Maluku.

Keywords : Regional Expenditure; PAD; HDI; Poverty

PENDAHULUAN

Salah satu masalah struktural utama dalam pembangunan Indonesia adalah kemiskinan. Karena banyak orang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang kompleks. (Purwono *et al.*, 2021). Meskipun angka kemiskinan nasional telah menunjukkan tren penurunan selama dua puluh tahun terakhir, tantangan yang dihadapi tetap kompleks. Lebih lanjut, kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi, dengan penduduk miskin tidak hanya dibatasi oleh pendapatan tetapi juga menghadapi kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan pekerjaan yang berkesinambungan. Situasi ini menggambarkan bahwasanya tren pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi belum bisa mengatasi pengurangan jumlah masyarakat miskin tanpa diimbangi dengan strategi yang mendukung pengalokasian dan pembangunan manusia yang inklusif.

Banyak faktor yang berasal dari sisi penawaran dan permintaan aktivitas ekonomi yang memengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah (Sugiharti *et al.*, 2022). Provinsi Maluku masih menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan geografis yang Sebagian besar kepulauan menjadikan Masyarakat memiliki keterbatasan akses pada layanan umum. Struktur perekonomian Maluku bergantung pada sektor-sektor primer seperti pertanian dan perikanan membuat pendapatan masyarakat sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan faktor cuaca. Tingginya angka kemiskinan ini sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku yang masih rendah, sehingga berada di peringkat terbawah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Maluku tidak dapat hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan kebijakan fiskal yang tepat melalui peningkatan belanja daerah, penguatan Pendapatan wilayah Maluku, dan investasi dalam kualitas hidup masyarakat untuk memutus siklus kemiskinan yang berkepanjangan.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku. Secara historis, Maluku dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, terutama di sektor maritim tetapi potensi ini belum sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan standar hidup masyarakat yang merata. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk mengurangi kemiskinan melalui pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan perluasan ketersediaan layanan penting seperti fasilitas umum yang mencakup kesehatan dan pendidikan (Firmasyah *et al.*, 2024). Menurut data BPS, pada September 2020 jumlah Masyarakat yang dikategorikan miskin di Maluku sebesar 17,99%, atau 322.000 penduduk. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target pembangunan nasional, yang menekankan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

Kemiskinan lebih jelas ketika melihat kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku, menurut BPS Indonesia secara umum relatif kurang dari standar yang telah ditetapkan, yaitu 73,40 pada tahun 2024, laju pertumbuhan hanya 0,71% per tahun. Hasil IPM menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli penduduk Maluku masih jauh dari ideal. Pada umumnya, pengeluaran regional merupakan alat kunci bagi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Menurut (Gethin, 2023) pengeluaran publik yang diarahkan ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa memperbaiki kualitas hidup banyak orang dan mengurangi ketimpangan. Pengeluaran publik tidak hanya berfungsi untuk mendistribusikan kembali sumber daya tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas jangka panjang.

Grafik 1 mengemukakan kemiskinan di Maluku masih menjadi masalah serius, dengan disparitas regional yang tajam (Maskur, 2023). Kota Ambon memiliki tingkat kemiskinan terendah, sekitar 4,9%, berkat akses sarana dan prasarana yang relatif lebih baik. Sebaliknya, Maluku Barat Daya mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, hampir 30%, diikuti oleh Kepulauan

Aru, sekitar 24,7%, dengan tingkat yang berfluktuasi. Buru dan Buru Selatan berada di kisaran menengah, yaitu 15–16%, meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Disparitas ini menggarisbawahi fakta bahwa wilayah kepulauan terpencil masih menghadapi hambatan pembangunan dan keterbatasan layanan publik dibandingkan dengan pusat pertumbuhan seperti Ambon.

Menurut (Markus Poschke, 2025) bahwa rendahnya persentase lapangan kerja formal dan tingginya tingkat wirausaha di negara-negara berkembang berkaitan erat dengan friksi atau konflik di pasar tenaga kerja. Friksi ini mencakup terbatasnya akses terhadap informasi lowongan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan dan permintaan pasar, serta lemahnya kemampuan sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal. Situasi ini diperparah oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka, yang memaksa banyak orang memilih berwirausaha atau bekerja di sektor informal bukan karena dorongan kewirausahaan yang kuat, melainkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Situasi ini menggambarkan bahwasanya elaborasi sumberdaya manusia beserta kebijakan penguatan keterampilan sangat penting untuk mengurangi friksi di pasar tenaga kerja, sehingga masyarakat yang kurang beruntung dapat memperoleh pekerjaan yang baik dan stabil serta secara efektif mengentaskan kemiskinan.

Fokus studi ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menekankan wilayah kepulauan dari perspektif keterbatasan akses, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tingginya angka kemiskinan. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada wilayah industri atau berbasis pariwisata, seperti Jawa, Sumatra, dan Bali, yang memiliki karakteristik fisik dan kondisi geografis yang berbeda. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengkaji kemiskinan bukan cuma dari perspektif makro, tetapi juga dari sudut pandang masyarakat kepulauan. Misalnya, penelitian ini mengkaji bagaimana sekolah-sekolah di pulau-pulau kecil dibangun, bagaimana rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memengaruhi kualitas layanan kesehatan, dan bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan upaya keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan kondisi yang telah disampaikan jelas bahwa masalah kemiskinan di Maluku tidak sepenuhnya bersifat mandiri. Hal ini mencakup isu-isu terkait lokasi geografis wilayah, kemampuan fisik melalui PAD, dan kualitas pembangunan manusia yang dievaluasi dalam IPM. Kompleksitas permasalahan ini membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang ada dengan lebih tepat, sehingga memungkinkan untuk menentukan faktor-faktor mana yang berpotensi memiliki dampak positif atau negatif terhadap ambang batas kemiskinan. Identifikasi permasalahan ini merupakan langkah awal yang krusial, sehingga penelitian dapat difokuskan pada variabel-variabel yang relevan dan menghasilkan analisis yang mendalam untuk proyeksi-

proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemiskinan

Menurut (Todaro & Smith, 2012) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang bukan semata-mata terkait kurangnya pendapatan melainkan kurangnya kemudahan memperoleh berbagai aspek penting kehidupan. Kemiskinan memiliki banyak dimensi, karena berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengakses layanan publik, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan bahkan menikmati kebebasan untuk memilih kehidupan yang mereka anggap bermakna. Menurut (Rusdi *et al.*, 2025) kemiskinan merupakan isu sosial yang kompleks dan masih menjadi fokus utama penelitian multidisiplin, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Isu ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan kemampuan seseorang atau keluarga dalam mencukupi kebutuhan primernya, tetapi juga terkait erat dengan akses yang tidak merata pada sektor pendidikan, layanan medis (kesehatan), dan peluang mendapatkan pekerjaan.

Kemiskinan memiliki banyak dimensi dan seringkali mengarah pada lingkaran setan kemiskinan. Pendapatan rendah menghalangi orang untuk menabung dan berinvestasi, sehingga produktivitas tetap rendah. Situasi ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, yang semakin memperkuat siklus kemiskinan dari generasi ke generasi. (Todaro, 2012) juga menekankan bahwa kemiskinan dapat bersifat sistemik, dipengaruhi oleh distribusi honorarium beserta peluang kerja yang tidak merata, serta ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah. (Todaro, 2012) juga mengklasifikasikan kemiskinan menjadi dua kategori yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang atau keluarga berstatus tergolong dalam kategori miskin minimum yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan primer beserta layanan kesehatan disebut kemiskinan yang absolut. Kemiskinan relatif mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan, di mana meskipun kebutuhan dasar terpenuhi, masih terdapat ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi dan sosial.

Amartya Sen (1999), mengembangkan konsep kemiskinan dengan mendefinisikannya sebagai keterbatasan kemampuan. Kemiskinan bukan sekadar didefinisikan sebagai kurangnya honorarium, melainkan ketidakmampuan guna meningkatkan kebebasan dan kapasitas dasar manusia, seperti kesehatan yang baik, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, seseorang mungkin memiliki pendapatan yang memadai tetapi tetap dianggap miskin jika tidak dapat mengakses layanan dasar atau menikmati kebebasan untuk memilih gaya hidup yang bermakna. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan manusia harus menjadi pusat strategi penanggulangan kemiskinan.

Alkire & Foster (2024), menciptakan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI), yang menilai kemiskinan berdasarkan tiga elemen primer meliputi pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Kemiskinan terjadi ketika sebuah rumah tangga mengalami deprivasi pada sepertiga atau lebih indikator multidimensi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemiskinan lebih kompleks daripada sekadar pendapatan, dan intervensi pemerintah harus menargetkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. MPI 2024 juga menekankan peran penting penyediaan barang publik seperti pendidikan dan kesehatan dalam mengurangi kemiskinan global.

Menurut (Nugroho, 2020) keterbatasan finansial seringkali menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Kondisi ekonomi yang buruk membuat beberapa keluarga hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga biaya pendidikan menjadi beban tambahan yang sulit ditanggung. Akibatnya, banyak anak dari keluarga berpenghasilan rendah terpaksa mengakhiri pendidikan setelah menyelesaikan sekolah menengah dan kehilangan kesempatan untuk mengasah potensi mereka melalui pendidikan tinggi. Situasi ini tidak hanya membatasi peluang kerja di masa depan, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan, karena terbatasnya akses terhadap pendidikan yang bermutu menyebabkan daya cipta dan pemasukan di masa depan relatif rendah.

Menurut (Renahy *et al.*, 2018) Studi yang mengkaji hubungan antara pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa individu yang kehilangan pekerjaan memiliki risiko lebih besar untuk terjebak dalam kemiskinan dan mengalami kekurangan materi. Hal ini disebabkan oleh hilangnya sumber pendapatan utama, yang secara langsung mengurangi kemampuan rumah tangga guna mencukupi kebutuhan primer beserta layanan kesehatan. Lebih lanjut, pengangguran juga berarti hilangnya berbagai manfaat tambahan yang biasanya diperoleh dari pekerjaan, seperti akses terhadap jaminan sosial, tunjangan kesehatan, atau kesempatan pengembangan keterampilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya memperburuk kerentanan ekonomi individu tetapi juga dapat menurunkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan dan memperlebar siklus kemiskinan struktural dalam masyarakat.

Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan

Belanja daerah merupakan instrumen kunci dalam kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Menurut (Gethin, 2023) belanja publik memiliki efek ganda yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan sebagai sarana pembangunan jangka panjang. Dalam konteks redistribusi, belanja daerah yang diarahkan pada layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi kelompok miskin. Menurut (Saputri & Sitorus, 2025) Belanja pemerintah adalah semua anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat. Di tingkat daerah, belanja ini disebut belanja daerah, yang

mencakup belanja rutin untuk pelayanan publik serta belanja pembangunan guna mencapai peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat regional.

Di sisi produktif, sarana dan prasarana dirancang melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat meningkatkan konektivitas, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar. Di Maluku, di mana mayoritas penduduk tinggal di pulau-pulau terpencil, pengelolaan belanja daerah yang efisien untuk transportasi laut, pendidikan, dan fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Dengan demikian, baik secara teoritis maupun empiris, belanja daerah diperkirakan akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan karena dapat menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat jaminan sosial. Menurut (Anderson *et al.*, 2018), data empiris menunjukkan bahwa belanja pemerintah berhubungan negatif dengan tingkat ketimpangan pendapatan, terutama untuk belanja kesejahteraan sosial dan program sosial lainnya. Hal ini mengemukakan semakin belanja pemerintah pada sektor sosial, semakin rendah tingkat ketimpangan dalam masyarakat. Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa dampak redistributif dari belanja pemerintah tidak selalu seimbang. Ketika ukuran ketimpangan dianalisis berdasarkan proporsi kuintil termiskin, hubungannya menjadi jauh lebih lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat belanja publik seringkali lebih dirasakan oleh kelas menengah dan atas daripada oleh kelompok termiskin. Dengan kata lain, kebijakan belanja pemerintah seringkali gagal untuk sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling terpinggirkan.

Hasil penelitian oleh Putri & Yefriza, (2025) menyatakan bahwasanya Belanja Daerah memiliki korelasi signifikan serta negatif terhadap tingkat kemiskinan artinya semakin besar alokasi anggaran untuk sektor produktif, semakin efektif upaya pengurangan jumlah penduduk miskin. Belanja pemerintah daerah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan program sosial berperan krusial dalam kemakmuran masyarakat (Fadlillah *et al.*, 2016). Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang memandang belanja daerah sebagai instrumen fiskal utama untuk memutus siklus kemiskinan di Provinsi Maluku.

H1 : Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Maluku

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Menurut (Oates, 1972) dalam bukunya *Fiscal Federalism*, desentralisasi fiskal merupakan konsep pembagian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan layanan publik mampu dilakukan lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber daya krusial untuk mendukung kemandirian finansial dan meningkatkan kapasitas daerah. Menurut (Ter- Minassian, 2020) menekankan bahwa PAD yang kuat

memungkinkan daerah untuk mendanai layanan publik tanpa terlalu mengandalkan pada transfer pemerintah pusat. Namun, hubungan antara PAD dan kemiskinan masih ambigu.

PAD yang diperoleh melalui pajak dan retribusi berpotensi menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah, terutama jika kebijakan pemungutannya tidak mempertimbangkan pemerataan. Sebaliknya, PAD yang disalurkan secara efisien ke sektor-sektor produktif dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Di Maluku, keterbatasan PAD menjadi tantangan tersendiri sehingga efektivitasnya harus dinilai berdasarkan bagaimana pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan inklusif.

Menurut (Purwono *et al.*, 2021), kemiskinan di Indonesia bukanlah masalah sementara, melainkan masalah kronis, dengan banyaknya rumah tangga yang terjebak dalam kemiskinan dalam kurun waktu yang lama. Fakta ini mencerminkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan rendah yang bersifat sementara, melainkan bersangkutan dengan akses yang sulit pada sektor pendidikan, layanan medis (kesehatan), peluang mendapatkan pekerjaan yang baik, dan infrastruktur yang mendukung kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus berfokus pada investasi jangka panjang, baik dalam modal manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, maupun modal fisik melalui pembangunan infrastruktur dasar yang meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar, layanan publik, dan kesempatan kerja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan kapasitas daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri, merupakan komponen penting dari sistem keuangan daerah, klaim (Akita *et al.*, 2020). Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah, dan pendapatan resmi lainnya adalah beberapa sumber pendapatan berbeda yang membentuk PAD. Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok adalah sumber utama pajak di tingkat provinsi. Sementara itu, pajak daerah termasuk pajak untuk restoran, hotel, iklan, penerangan jalan, hiburan, parkir, dan air tanah dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, menurut peraturan dan perundang-undangan, kabupaten dan kota berhak atas persentase pajak provinsi, yang meningkatkan kemampuan fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah faktor krusial meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik (Kartika & Drajad, 2020). Penelitian (Alfiana, 2022) menyimpulkan PAD berkorelasi signifikan serta positif pada penanggulangan kemiskinan. Artinya, PAD berperan vital karena meningkatnya PAD semakin besar pula kapasitas pemda untuk melaksanakan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat dan meningkatkan

efektivitas upaya pembangunan yang menjangkau masyarakat miskin.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Maluku

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini didasarkan oleh *Human Capital Theory* dicetuskan oleh Gary S. Becker (1993), sebagai grand teori yang menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, pembangunan manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Teori ini menyatakan bahwa berinvestasi pada manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan akan meningkatkan produktivitas individu dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai instrumen fiskal yang memungkinkan investasi dalam modal manusia, terutama dalam penyediaan layanan publik yang esensial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan akumulasi modal manusia karena mencakup dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Becker (1993), dalam teori modal manusianya, menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan investasi yang menghasilkan imbal hasil ekonomi berupa peningkatan produktivitas, daya saing, dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya IPM, warga negara memiliki kemampuan lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Di Maluku, dengan angka partisipasi sekolah yang relatif rendah dan layanan kesehatan yang masih minim, peningkatan IPM merupakan faktor krusial dalam mengatasi kemiskinan struktural. Akibatnya, IPM diprediksi akan berdampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, karena modal manusia yang lebih berkualitas akan mengurangi risiko kemiskinan yang dialami masyarakat.

Menurut (Masduki *et al.*, 2022), isu kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan permasalahan yang signifikan bagi beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan di berbagai sektor, masih banyak daerah yang masih terbelakang, dengan hampir 30% wilayah Indonesia termasuk dalam kategori ini. Daerah terbelakang biasanya ditandai dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang terbatas, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang rendah, serta produktivitas ekonomi yang minim. Salah satu langkah yang umum diambil pemerintah daerah untuk mengatasi keterbelakangan adalah dengan menerapkan kebijakan pemekaran wilayah. Pemekaran diyakini dapat mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah yang kurang terlayani. Namun, pada kenyataannya, kebijakan ini tidak selalu efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan

atau meningkatkan IPM secara signifikan. Hal ini terjadi karena pemekaran wilayah seringkali tidak dibarengi dengan kesiapan kelembagaan, kapasitas keuangan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Menurut (Becker, 1993) Peningkatan IPM, yang mencerminkan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup, berakar kuat pada teori modal manusia Becker. Ia meyakini bahwa pendidikan dan pelatihan bukan sekadar konsumsi sosial, tetapi juga investasi yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing individu di dunia kerja. Semakin baik pendidikan dan kesehatan suatu masyarakat, semakin besar kemungkinan masyarakat tersebut memperoleh pendapatan yang memadai dan terbebas dari kemiskinan. Sebaliknya, IPM yang rendah menghambat produktivitas tenaga kerja dan memperparah ketimpangan sosial, sehingga kemiskinan menjadi lebih struktural dan sulit diatasi. Oleh karena itu, peningkatan IPM merupakan strategi kunci untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan karena memperluas akses bagi masyarakat kurang mampu terhadap sumber daya manusia yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menurut (Nugraha *et al.*, 2025) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah parameter krusial yang dipakai guna mengevaluasi sejauh mana pembangunan manusia telah tercapai pada suatu kawasan daerah. IPM bukan hanya menilai pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup, tetapi juga memberikan panduan untuk merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan. IPM dan kemiskinan saling berkaitan erat, karena pendidikan dan kesehatan yang buruk dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan membatasi peluang ekonomi. Di sisi lain, peningkatan IPM efektif dalam menekan angka kemiskinan dengan memperluas jangkauan suatu individu atau kelompok pada pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang lebih baik.

Penelitian (Permana & Pasaribu, 2023) menunjukkan bahwa IPM memiliki korelasi negative serta relative tidak signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengemukakan adanya IPM yang meningkat tidak secara langsung mengurangi angka kemiskinan, meskipun tetap berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga elemen ini mencerminkan kualitas modal manusia, di mana peningkatan pada salah satunya dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat.

H1 : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Maluku

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif menggunakan metode kausal- komparatif (*explanatory research*) untuk menjelaskan hubungan antara Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di

Provinsi Maluku. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dapat menilai secara objektif dan terukur sejauh mana pengaruh antar variabel. Selain itu, metode ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji hipotesis yang menekankan hubungan sebab-akibat antara faktor ekonomi struktural dan pembangunan manusia. Metode ini berfokus pada pengukuran empiris data ekonomi agregat di tingkat regional.

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan menggabungkan data periode waktu dan ruang berupa data panel yang mencakup 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Maka dilakukan metode pengambilan sampel jenuh (*census sampling*), sehingga setiap anggota populasi sampel dijadikan dalam penelitian. Waktu populasi ditentukan pada rentang 2020–2024, Periode ini dipilih karena mencerminkan fase pemulihan ekonomi pasca-dampak pandemi COVID-19, yang secara langsung memengaruhi tingkat kemiskinan dan efektivitas kebijakan fiskal daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota sebagai unit observasi agar memberikan hasil yang lebih representatif terhadap kondisi Provinsi Maluku secara keseluruhan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan dan pengolahan data sekunder dari instansi pemerintah resmi. Pengambilan data sekunder dilakukan melalui laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyediakan berbagai informasi mengenai tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan menyediakan data realisasi belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan menggunakan Eviews 12 untuk menangkap variasi antar kabupaten/kota (*cross-section*) dan perubahan dari waktu ke waktu (*time series*). Model dasar yang digunakan adalah Model Efek Tetap (FEM), karena setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik unik yang tetap konstan selama periode penelitian. Pemilihan model ditentukan melalui serangkaian uji spesifikasi, termasuk uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM), untuk memastikan terpilihnya model yang paling tepat. Setelah model optimal diperoleh, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model regresi. Uji tersebut meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tahapan selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t untuk mengestimasi determinan seluruh variabel independen (Belanja Daerah, PAD, dan IPM) terhadap kemiskinan secara terpisah, uji-F untuk menguji determinan ketiga variabel bebas secara simultan terhadap kemiskinan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya variasi tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas dalam penelitian ini. Model regresi panel yang digunakan adalah :

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 BD_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Kemiskinan: Jumlah Penduduk Miskin
 i : Unit *cross section* (kabupaten/kota)
 β_0 : Konstanta
 $\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi variabel independen
 BD_{it} : Belanja Daerah (kabupaten/kota) tahun 2020-2024
 PAD_{it} : Pendapatan Asli Daerah (kabupaten/kota) tahun 2020-2024
 IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia (kabupaten/kota) tahun 2020-2024
 ϵ_{it} : *Error term* (Kabupaten/kota)

Penelitian ini untuk memastikan keakuratan dan ketahanan data dan hasil melalui pengujian validitas dan reliabilitas yang komprehensif. Validitas dipertahankan dengan berfokus pada tiga aspek utama yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas internal. Validitas dicapai dengan menggunakan variabel dan indikator nasional terstandar yang banyak digunakan dalam penelitian ekonomi regional, seperti Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan. Validitas konstruk dipastikan dengan menyelaraskan kerangka teori dengan operasionalisasi variabel yang mewakili penyebab kemiskinan. Validitas internal diperkuat dengan menggunakan model regresi data panel efek tetap, yang membantu mengendalikan perbedaan karakteristik tetap di seluruh wilayah, sehingga mencegah hasil estimasi terdistorsi oleh faktor-faktor yang tidak teramati. Selain itu, serangkaian uji diagnostik, termasuk uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan spesifikasi model (Chow dan Hausman), dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian bebas dari bias dan memenuhi asumsi klasik.

Reliabilitas dipastikan melalui konsistensi sumber data dan stabilitas hasil analisis. Semua data diperoleh dari lembaga pemerintah terkemuka dengan kredibilitas tinggi dan metodologi statistik yang konsisten selama bertahun-tahun. Untuk menguji reliabilitas hasil, uji ketahanan dilakukan dengan membandingkan hasil model dalam bentuk logaritmik dan non-logaritmik, serta dengan mengganti variabel dependen jumlah penduduk miskin dengan persentase kemiskinan. Hasil yang konsisten di berbagai pengujian menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Melalui penerapan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diyakini memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, sehingga dapat menghasilkan hasil yang kredibel dan dapat diandalkan dalam menggambarkan hubungan antara kebijakan fiskal daerah, pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menilai apakah FEM lebih tepat daripada CEM, sedangkan uji Hausman dipakai untuk membandingkan FEM dengan REM. Menurut (Hansen, 2021), uji

Chow pada dasarnya membandingkan model OLS gabungan dengan model yang mengakomodasi efek tertentu (efek tetap). Menurut (Ghozali, 2018) juga menekankan bahwa uji ini krusial dalam memilih model regresi panel. Hipotesis nol (H_0) CEM lebih akurat daripada FEM, sementara hipotesis (H_1) FEM lebih unggul

H_0 : Probabilitas $> 0,05$ terpilih CEM H_1 : Probabilitas $< 0,05$ terpilih FEM.

Dari tabel 1 hasil *Chow Test* menunjukkan p-value $< 0,05$ maka CEM/ hipotesis nol ditolak, dan *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih.

2. Uji Hausman

Hausman Test digunakan mengidentifikasi model terpilih diantara FEM, REM. Menurut (Hansen, 2021) dalam uji tersebut dirancang untuk menentukan apabila terdapat diferensiasi yang signifikan kedua model itu. Dalam percobaan ini, hipotesis nol (H_0) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, sehingga

REM dianggap lebih tepat.

H_0 : Probabilitas $> 0,05$ terpilih REM H_1 : Probabilitas $< 0,05$ terpilih FEM

Pada Tabel 2 menunjukkan Hasil uji Hausman senilai nilai $p < 0,05$, yang menunjukkan bahwa asumsi tidak adanya korelasi pada *Random Effects Model* (REM) tidak berlaku, sehingga penggunaan *Fixed Effects Model* (FEM) lebih tepat (Ghozali, 2018). Dengan hasil ini, tidak perlu dilakukan uji LM, karena Chow dan *Hausman Test* telah membuktikan bahwa FEM merupakan model yang paling tepat. Tujuan uji LM adalah menemukan model terbaik antara REM dan CEM.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan linier yang kuat antar variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018) multikolinearitas terjadi apabila nilai korelasi antar variabel bebas melebihi 0,90, sedangkan apabila korelasinya dibawah 0,90 maka data dianggap tidak mempunyai masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Menjelaskan bahwa hubungan BD & PAD berkorelasi senilai 0,705223 $< 0,85$; BD & IPM senilai 0,317158 $< 0,85$; dan antara PAD dan IPM senilai 0,670739 $< 0,85$. Dengan demikian, model studi ini tidak mengalami gejala multikolinearitas, maka memungkinkan setiap variabel bebas diinterpretasikan dengan benar (Ghozali, 2018).

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroscedasticity test dilakukan guna mengevaluasi diferensiasi varians residual diantara observasi. Menurut (Ghozali, 2018), adanya heteroskedastisitas dapat membuat estimator *Ordinary Least Squares* (OLS) menjadi kurang efisien, meskipun tetap tidak bias. Dalam studi ini, pengkajian diberlakukan memakai *Glejser method* atau *Breusch-Pagan*

meregresikan nilai residual pada variabel independen. Apabila prob > 0,05, bisa dikategorikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila < 0,05, menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas.

Pada tabel 4. hasil heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel X1 0,7886 > 0,05, X2 0,6537 > 0,05, dan X3 0,1506 > 0,05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga varians residualnya konstan, dan model regresi yang digunakan dapat dikatakan tepat (Ghozali, 2018).

Persamaan Regresi Data Panel

$$Y = 13.4032273748 - 0.132174389493 * X1 + 0.0645632591255 * X2 - 2.32571814499 * X3$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 13.403 artinya, bahwa apabila variabel Belanja Daerah X1, PAD X2, dan IPM X3 maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 134%.
2. Nilai koefisien beta variabel Belanja Daerah (X1) sebesar 0,13% jika variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Begitu pula sebaliknya jika variabel lain konstan dan variabel x1 mengalami penurunan 1% maka variabel Y akan mengalami kenaikan 0,13%.
3. Nilai koefisien beta variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) sebesar 0,06 jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1% maka variabel Kemiskinan (Y)) akan mengalami penurunan sebesar 0,06%. Begitu pula sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan 1% maka variabel Y akan mengalami kenaikan 0,06%.

Nilai koefisien beta variabel Indeks Pembangunan Manusia (X3) sebesar 2,32 jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan 1% maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 2,32% . Begitu pula sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami penurunan 1% maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 2,32%.

Hasil Analisis Regresi

1. Uji Statistik Parsial (Uji T)

Tujuan uji-t, menurut (Hansen, 2021) adalah menetapkan signifikansi peranan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatif (H1) menyatakan adanya pengaruh yang signifikan, sedangkan hipotesis nol (H0) menyatakan bahwasanya variabel bebas tidak berkorelasi secara signifikan. Menurut (Ghozali, 2018), karakteristik pengolahannya ialah H0 diterima & H1 ditolak apabila memperoleh signifikansi > alpha, menunjukkan bahwasanya variabel bebas tidak berkorelasi terhadap variabel yang terikat. Di sisi lain, determinan antara variable bebas dan variable terikat signifikan apabila < alpha, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima.

1.1 Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji-t parsial yang tercantum pada Tabel 5, menurut teori (Ghozali, 2018) sejumlah temuan penting dapat diidentifikasi. Untuk variabel Belanja Daerah (X_1), nilai t hitung adalah $-2,012521 > \text{nilai } t \text{ tabel } 2,005746$ pada tingkat signifikansi $0,0508 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaan dana publik, semakin tinggi peluang keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan.

1.2 Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2), t hitung senilai $2,558525 > \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 2,005746$ dengan tingkat signifikan $0,0143 < 0,05$. Maka dari itu, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak yang relative signifikan positif terhadap Tingkat kemiskinan di Maluku. Hasil ini menggambarkan bahwa dalam situasi tertentu, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) masih dapat memberikan tekanan tambahan pada masyarakat, misalnya melalui pajak atau retribusi daerah.

1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Hasil uji untuk Indeks Pembangunan Manusia (X_3), t hitung senilai $-4,565257 > t \text{ table senilai } 2,005746$, dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menegaskan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa IPM memiliki korelasi signifikan negatif terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli telah terbukti secara signifikan mengurangi kemiskinan di Provinsi Maluku.

2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Untuk menentukan apakah variabel independen dalam model regresi secara signifikan mempengaruhi variabel dependen pada saat yang sama, maka uji F digunakan. (Hansen, 2021) menyatakan bahwa uji ini bertujuan untuk menguji signifikansi total dari semua variabel independen dalam suatu model. Hipotesis (H_1) menyatakan bahwa semua faktor independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan, tetapi hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa tidak satu pun dari faktor tersebut yang berpengaruh. Karakteristik pemilihan Keputusan yang dikemukakan oleh (Ghozali, 2018), adalah sebagai berikut: H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan $F < 0,05$, yang menggambarkan bahwasanya seluruh variabel bebas memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Di sisi lain, H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F \text{ lebih } > 0,05$, yang menggambarkan bahwasanya faktor-faktor independen tidak memengaruhi variabel dependen secara signifikan pada saat yang bersamaan.

Tabel 6 menunjukkan nilai F hitung sebesar $527,7871, > \text{nilai } F \text{ tabel sebesar } 8,577005$,

dengan tingkat signifikansi 0,0000, $< 0,05$. Karena H_0 ditolak dan H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dengan kata lain, belanja daerah, PAD, dan IPM berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Selanjutnya, koefisien determinasi diuji untuk menilai sejauh mana model mampu menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Selanjutnya, uji koefisien determinasi diberlakukan guna mengevaluasi seberapa jauh model dapat menginterpretasikan pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2018). Pada tabel 7. hasil pengujian menunjukkan nilai R- square yang disesuaikan sebesar 0,992176, setara dengan 99,2176% (Ghozali, 2018). Nilai ini menginterpretasikan bahwa variabel bebas, termasuk belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat menjelaskan 99,2176% variasi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Sementara itu, sisanya sebesar 0,7824% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Hasil ini menggambarkan model regresi yang diterapkan memiliki daya penjas yang sangat tinggi terhadap fenomena yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan

Hasil regresi data panel menyimpulkan bahwasanya belanja daerah memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. Secara ringkas, setiap peningkatan belanja daerah yang disalurkan dengan baik, terutama pada beberapa sektor produktif meliputi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana dan prasarana, dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Fakta ini relevan dengan argumen (Ghozali, 2018) yang mengemukakan bahwasanya suatu variabel dapat dijelaskan memiliki pengaruh yang signifikan jika nilai probabilitas dari uji-t berada di bawah atau mendekati ambang batas 0,05. Secara teoritis, hasil ini mendukung teori kebijakan publik yang menyoroti peran pemerintah dalam menyediakan layanan publik melalui belanja produktif, yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup. Di wilayah Maluku, sebuah wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang tinggi, belanja daerah yang tepat sasaran merupakan alat penting untuk mengatasi keterbatasan akses, menciptakan peluang ekonomi baru, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap kemiskinan struktural.

Penelitian (Putri & Yefriza, 2025) yang menemukan dampak negatif yang signifikan dari belanja daerah terhadap kemiskinan semakin mendukung temuan penelitian ini. Dalam konteks Maluku, belanja daerah terbukti menjadi alat krusial dalam penanggulangan kemiskinan,

terutama jika diarahkan pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Situasi ini berkaitan dengan karakteristik kepulauan Maluku yang menghadapi tantangan dalam akses layanan publik dan kesenjangan antarwilayah. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan mitigasi tren kemiskinan di wilayah Maluku, alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran dan terfokus merupakan stimulus perekonomian jangka pendek sekaligus rencana jangka panjang.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku. (Ghozali, 2016) menjelaskan bahwa koefisien positif pada hasil regresi menyatakan korelasi yang sejalan diantara variabel independen dan variabel dependen, di mana setiap peningkatan PAD juga diiringi dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Fenomena ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan struktur PAD di Provinsi Maluku yang masih cukup terbatas dan sangat bergantung pada sumber pendapatan yang regresif, khususnya pajak dan retribusi daerah. Jika sumber pendapatan ini tidak dikelola dengan prinsip keadilan dan efisiensi, justru akan menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, pajak daerah yang tinggi untuk barang konsumsi atau retribusi untuk layanan dasar dapat menurunkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan membatasi mobilitas ekonomi mereka. Dalam situasi demikian, peningkatan PAD tidak serta merta menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, tetapi justru dapat memperlebar ketimpangan sosial.

Rendahnya diversifikasi sumber PAD di Maluku juga menjadi faktor penyebabnya. Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada kegiatan ekonomi produktif seperti pariwisata berkelanjutan, industri kreatif, atau pemanfaatan sumber daya kelautan yang optimal, dan lebih terfokus pada pungutan rutin yang bersifat sementara. Penelitian (Alfiana, 2022) menemukan temuan berbeda, yaitu PAD berkorelasi signifikan positif terhadap penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperluas kapasitas fiskal daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Maluku, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk memperkuat independensi fiskal yang selama ini masih bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. Dengan otonomi fiskal yang lebih besar, pemerintah daerah mampu menganggarkan lebih efisien di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, fungsi PAD bukan sebatas sumber pendapatan melainkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang krusial dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, jika dikelola dan diarahkan secara produktif.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan dan negatif memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku, menurut hasil regresi data panel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan IPM memberikan kontribusi substansial terhadap pengurangan kemiskinan. Ini menyiratkan bahwa proporsi orang berada di *poverty line trap* menurun seiring dengan peningkatan kemajuan pembangunan manusia dalam kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Hasil ini konsisten dengan teori modal manusia, yang menyoroti nilai belanja kesehatan dan pendidikan sebagai komponen penting dalam meningkatkan tingkat produktivitas baik secara individu maupun kolektif. (Ghozali, 2018) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa ada korelasi substansial antara penurunan tingkat kemiskinan serta perbaikan kualitas modal manusia (*human capital*), sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi negatif dan signifikan. Meningkatkan IPM adalah salah satu strategi terbaik untuk mengakhiri siklus kemiskinan di lingkungan Maluku, di mana faktor infrastruktur dan geografis sering menjadi hambatan. Sementara kesehatan yang prima meningkatkan kemampuan kerja dan produktivitas ekonomi seseorang, orang yang menempuh perguruan tinggi cenderung mempunyai keterampilan yang lebih besar dan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Peningkatan IPM berdampak secara multidimensi mulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Misalnya, keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya mampu mendistribusikan sumber daya secara lebih efektif, memiliki daya beli yang lebih besar, dan lebih mampu menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan siklus positif yang memperkuat pembangunan manusia dan sekaligus mengurangi kemiskinan. Namun, sebuah studi oleh (Permana & Pasaribu, 2023) menunjukkan bahwa meskipun IPM berdampak negatif terhadap kemiskinan, dampaknya relative kecil. Oleh karena itu, tren IPM yang meningkat tidak secara langsung mengurangi jumlah penduduk miskin, terutama dalam jangka yang relative pendek. Hal ini dapat dipahami karena peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup membutuhkan waktu untuk menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang signifikan. Di Maluku, temuan ini penting mengingat masih tingginya disparitas regional dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar di kepulauan ini. Oleh karena itu, meskipun IPM tetap menjadi ukuran penting pembangunan manusia, dampaknya terhadap kemiskinan akan lebih signifikan jika didukung oleh kebijakan fiskal yang stabil dan investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis regresi panel menggunakan model efek tetap untuk 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku selama periode ini, muncul beberapa kesimpulan penting.

Pertama, belanja daerah memainkan peran penting terhadap penurunan Tingkat kemiskinan. Hal ini menyatakan bahwasanya peningkatan alokasi dana, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat mengurangi angka kemiskinan. Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkorelasi signifikan positif terhadap angka kemiskinan. Hasil ini menyatakan bahwasanya peningkatan PAD, yang sumber utamanya dari insentif pajak dan retribusi, justru meningkatkan tekanan pada masyarakat kurang mampu. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkorelasi signifikan negatif terhadap kemiskinan, karena tren peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang lebih baik dapat menurunkan angka kemiskinan. Secara keseluruhan, variabel belanja daerah, PAD, dan IPM telah terbukti memainkan peran yang signifikan dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di Maluku. Dengan koefisien determinasi yang sangat tinggi ($\text{Adjusted } R^2 = 99,2\%$), model ini menunjukkan kemampuan yang kuat untuk menjelaskan variasi kemiskinan di dalam wilayah tersebut. Kesimpulan ini menggarisbawahi bahwa permasalahan kemiskinan di Maluku tidak hanya mencerminkan kondisi geografis negara kepulauan, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan fiskal dan keberlanjutan pembangunan sumber daya.

Berdasarkan temuan studi ini, merekomendasikan agar pemerintah daerah di Provinsi Maluku memprioritaskan belanja daerah pada sektor yang produktif dan inklusif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung akses masyarakat di wilayah kepulauan. Lebih lanjut, pengelolaan pendapatan daerah hendaknya difokuskan pada sumber-sumber yang tidak membebani masyarakat kurang mampu, seperti pengembangan potensi ekonomi lokal dan pariwisata berkelanjutan, agar pendapatan daerah benar-benar dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu menjadi fokus utama, dengan investasi jangka panjang pada pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup, karena pembangunan manusia telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan.

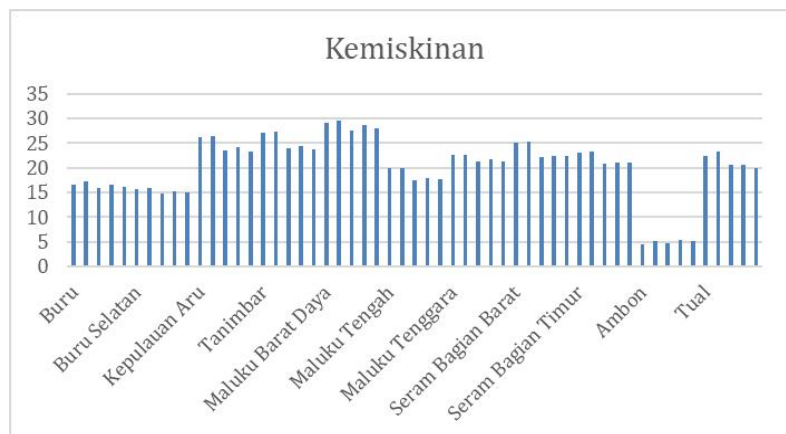
DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. (199 C.E.). *Development as Freedom* (First). Alfred A. Knopf.
- Amory Gethin. (2023). REVISITING GLOBAL POVERTY REDUCTION: PUBLIC GOODS AND THE WORLD DISTRIBUTION OF INCOME, 1980-2022. In *World Inequality Lab: Vol. 2023/2024* (pp. 21–23). Global Working Hours.
- Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI, & USAID Economic Growth Support Activity (EGSA). (2021). *TWO DECADES OF FISCAL DECENTRALIZATION IMPLEMENTATION IN INDONESIA: Vol. Vol 1* (Ubaidi S. Hamidi & Dewi Puspita, Ed.; First, pp. 1–239). Fiscal Policy Agency. Badan Pusat Statistik. (2025, May 15). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEzIzI=/Metode-Baru-Indeks-Pembangunan-Manusia.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. (2024, July 30). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Persen), 2024*. [https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4IzI=/Persentase-Penduduk Miskin-](https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4IzI=/Persentase-Penduduk-Miskin-)

- Provinsi-Maluku.Html.
- Bruce E. Hansen. (2021). *ECONOMETRICS* (First Edition, pp. 1–905). University of Wisconsin.
- Chariza Putri, & Yefriza. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 8 No 1, 266–275.
- Edward Anderson, Maria Ana Jalles d'Orey, Maren Duvendack, & Lucio Esposito. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta- regression Analysis. *World Development*, 60–71.
- Emilie Renahy, Christiane Mitchell, Agnes Molnar, Carles Muntaner, Edwin Ng, Fariyah Ali, & Emilie Renahy1, C. M. A. M. C. M. 3, E. N. F. A. P. O. (2018). Connections between unemployment insurance, poverty and health: a systematic review. *The European Journal of Public Health*, 28 no 2, 269–275.
- Galih Nugraha, Dede Sri Rahayu, & Aso Sukarso. (2025). KEMISKINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA: TANTANGAN DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9 No 1.
- Gary S. Becker. (1993). HUMAN CAPITAL. In *Winner of the Nobel Prize in Economics*. Hardinandar, & Fajrin. (2019). “Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua).” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4 (1), 1–12.
- Imam Ghozali. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Prrogram IBM SPSS 25: Vol. Vo no 9* (9th ed., pp. 1–528). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iwan Harsono, Isnan Purnama, Muhammad Firmansyah, Muhammad Irwan, & Himawan Sutanto5. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal* , 5 (1).
- Khusnul Fhatimah Rusdi, I Ketut Patra, & Rahmad Solling Hamid. (2025). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9 No 2.
- Markus Poschke. (2025). Wageemployment,unemploymentandself- employmentacross countries. *Journalof Monetary Economics*.
- Maskur, S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. . *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, No 8(1), 82–95.
- Michael P. Todaro, & Stephen C. Smith. (2012). *Ecnomic Development* (12th edition, pp.316–366). Pearson Education.
- Nana Alfiana. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 8 NO. 2, 154–163.
- Rudi Purwono, Wahyu Wisnu Wardana, Tri Haryanto, & M, khoerul M. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*.
- Sherly Adelia Ahyani Saputri, & Antoni Sitorus. (2025). ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH,UPAH MINIMUM PROVINSI DAN INVESTASI PMDN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PULAU SUMATERA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9 No 1.
- SKID Kemenkeu. (2025, July 5). *SIKD Next Generation*. <https://Sikd.Kemenkeu.Go.Id/>.
- Sugiharti, Lilik, Rudi Purwono, Miguel Angel Esquivias, & Ari Dwi Jayanti. (2022).Poverty Dynamics in Indonesia: The Prevalence and Causes of Chronic Poverty. *Journal of Population and Social Studies* 30, 10.25133.

- Takahiro Akita, Awaludin Aji Riadi, & AliRizal. (2020). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general location fund equalize fiscal revenues? *ORIGINAL ARTICLE*.
- Todaro, M. P. (2013). *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Todaro, Michael dan Smith, & Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Erlangga.
- Uki Masduki, Wiwiek Rindayati, & Sri Mulatsih. (2020). How can quality regional spending reduce poverty and improve human development index? . *Journal of Asian Economics*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives – Shaping our Future in a Transforming World* (Global Report Series, Vol. 32, pp. 1–305). United Nations Development Programme (UNDP).
- Wallace E. Oates. (1972). Fiscal Federalism. In *The Harbrace Series In Business and Economic*.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Grafik 1. Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	118.317320	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	186.804689	10	0.0000

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross section random	14.273823	3	0.0026

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

BD (X1)	PAD X2	IPM X3
1.000000	0.705223	0.317158
0.705223	1.000000	0.670739
0.317115	0.670739	1.000000

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Prob.
C	0.1804
X1_BD	0.7886
X2_PAD	0.6537
X3_IPM	0.1506

Tabel 5. Hasil Uji T

Variable	t-Statistic	Prob.
C	5.768198	0.0000
X1_BD	-2.012521	0.0508
X2_PAD	2.558525	0.0143
X3_IPM	-4.565257	0.000

Tabel 6. Hasil Uji F

Alpha	F-Statistic	Prob.(F-Statistic)
0,05	527.7871	0.000000

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-Squared	0.994060
Adjusted R-square	0.992176